

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa Sirnajaya Kabupaten Bekasi

Tiara Sapitri^{1*}, Lusian Putri², Joni Mulyadi³, Farisha Akeilla Nuralifiyah⁴, Fathihattul Ihsan⁵, Muhammad Hafizh Mahardika⁶, Winona Dea Nur afni⁷

¹⁻⁷ Politeknik Bina Mandani, Indonesia

email: tiarasapitri558@gmail.com¹

Article Info :

Received:
26-06-2026
Revised:
03-07-2026
Accepted:
11-07-2026

Abstract

This study aimed to examine the influence of organizational culture and leadership on employee performance in organizations located in North Cikarang District. A quantitative research approach with a survey method was employed involving 70 respondents selected through purposive sampling. Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 3 software. The results revealed that organizational culture had a positive and significant effect on employee performance, with a path coefficient of 0.556, a t-statistic of 6.777, and a p-value of 0.000. Leadership also showed a positive and significant effect on employee performance, with a path coefficient of 0.269, a t-statistic of 2.706, and a p-value of 0.007. The R-square value of 0.425 indicates that organizational culture and leadership jointly explain 42.5% of the variance in employee performance. These findings highlight the importance of strengthening organizational culture supported by effective leadership practices to improve employee performance.

Keywords: Employee Performance, Human Resource Management, Leadership, Organizational Culture, PLS-SEM.

Akbsrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada organisasi di Kecamatan Cikarang Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang melibatkan 70 responden yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien jalur sebesar 0,556, nilai *t-statistic* sebesar 6,777, dan *p-value* sebesar 0,000. Kepemimpinan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien jalur sebesar 0,269, nilai *t-statistic* sebesar 2,706, dan *p-value* sebesar 0,007. Nilai R-square sebesar 0,425 menunjukkan bahwa budaya organisasi dan kepemimpinan mampu menjelaskan 42,5% variasi kinerja karyawan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan budaya organisasi yang didukung oleh kepemimpinan yang efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan.

Kata Kunci: Budaya Organisasi, Kepemimpinan, Kinerja Karyawan, PLS-SEM, Manajemen Sumber Daya Manusia.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang berperan penting dalam mewujudkan pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014). Perluasan kewenangan tersebut diikuti dengan meningkatnya alokasi Dana Desa yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan yang inklusif, memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat, serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional berbasis desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2024). Peningkatan kapasitas fiskal desa pada saat yang sama memperbesar tuntutan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada hasil karena efektivitas desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan

oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas institusi yang mengelolanya (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022). Dalam perspektif tata kelola publik kontemporer, transparansi dan akuntabilitas diposisikan sebagai fondasi utama *good governance* karena keduanya membentuk mekanisme pengawasan, memperkuat legitimasi pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik (Sofyani et al., 2023). Perkembangan digitalisasi pemerintahan dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi juga mendorong pemerintah desa untuk tidak lagi memandang transparansi sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan sebagai instrumen strategis dalam menghasilkan tata kelola yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kajian mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kedua prinsip tersebut secara konsisten berhubungan dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa, efektivitas pelayanan publik, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Cahyani et al., 2022). Penelitian Husni et al. (2023) memperlihatkan bahwa transparansi yang diikuti oleh peningkatan kinerja pemerintah desa mampu membangun kepercayaan publik melalui tersedianya informasi yang mudah diakses dan dapat diverifikasi oleh masyarakat (Husni et al., 2023). Kajian Yudastio dan Azriya (2023) juga menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan kombinasi yang saling memperkuat dalam menciptakan tata kelola dana desa yang lebih efektif dibandingkan apabila masing-masing faktor dipandang secara terpisah (Yudastio & Azriya, 2023). Bukti empiris yang lebih mutakhir menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban, tetapi juga mampu menekan persepsi korupsi serta memperbaiki kualitas hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat (Oktavia & Biduri, 2024). Penelitian Putra dan Putra (2025) bahkan menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berkontribusi terhadap penurunan kecenderungan fraud melalui mekanisme keadilan organisasi sebagai variabel mediasi, sehingga hubungan antarvariabel tersebut bersifat lebih kompleks dibandingkan hubungan langsung yang selama ini banyak diasumsikan (Putra & Putra, 2025). Sintesis berbagai temuan tersebut memperlihatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar instrumen administratif, melainkan merupakan mekanisme tata kelola yang memengaruhi efektivitas organisasi publik melalui jalur kelembagaan, perilaku aparatur, serta persepsi masyarakat.

Literatur yang berkembang masih menunjukkan sejumlah keterbatasan konseptual dan empiris yang menghambat terbentuknya pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme peningkatan tata kelola pemerintahan desa. Sebagian besar penelitian masih berorientasi pada pengelolaan dana desa atau akuntabilitas keuangan sehingga indikator tata kelola pemerintahan desa secara lebih luas belum memperoleh perhatian yang proporsional (Setiyawati et al., 2023). Penelitian pada wilayah Kabupaten Bekasi juga lebih banyak mengevaluasi implementasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dibandingkan menguji secara langsung pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa (Oci et al., 2023). Kajian di Kabupaten Bekasi berikutnya masih menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai objek evaluasi administratif tanpa mengembangkan model hubungan kausal yang mampu menjelaskan kontribusinya terhadap *good governance* secara empiris (Choirunnisa & Yusnita, 2024). Penelitian terbaru di berbagai daerah juga memperlihatkan bahwa implementasi transparansi belum selalu menghasilkan efektivitas tata kelola apabila kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, dan mekanisme pengawasan masyarakat belum berkembang secara memadai (Fernanda et al., 2025). Temuan lain menunjukkan bahwa hubungan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan APBDes masih menghasilkan variasi antarwilayah sehingga generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas dan memerlukan pengujian pada konteks desa yang berbeda (Ningsih & Yuliana, 2025).

Keberadaan kesenjangan empiris tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa tidak dapat diasumsikan berlangsung secara otomatis hanya melalui peningkatan keterbukaan informasi atau penyusunan laporan pertanggungjawaban yang sesuai regulasi. Pemerintah desa menghadapi tantangan berupa meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik, percepatan digitalisasi pelayanan, serta kebutuhan untuk membangun kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan sehingga evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi *good governance* menjadi semakin penting (Wijaya, 2025). Kajian terbaru juga memperlihatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas masih memerlukan integrasi dengan mekanisme *good governance* agar mampu menghasilkan pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Suciana et al., 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan desa

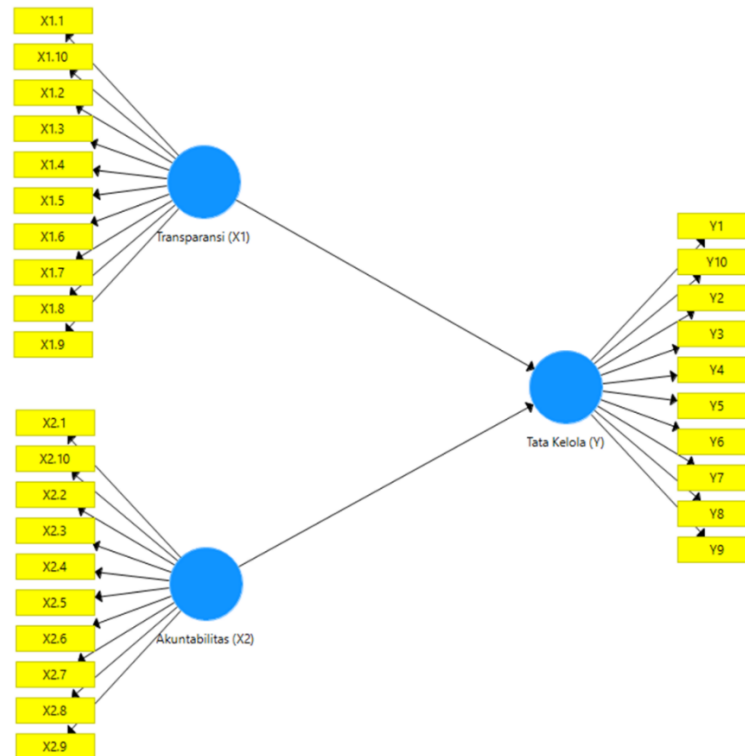
masih memerlukan pembuktian empiris pada konteks lokal yang memiliki karakteristik kelembagaan dan sosial yang berbeda. Desa Sirnajaya Kabupaten Bekasi menjadi konteks yang relevan untuk dikaji karena dinamika pembangunan, pengelolaan APBDes, serta tuntutan pelayanan publik memerlukan penerapan prinsip tata kelola yang semakin berkualitas. Hasil penelitian pada konteks desa ini diharapkan mampu memperkaya bukti empiris mengenai implementasi good governance pada level pemerintahan desa sekaligus memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai efektivitas transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai determinan utama tata kelola pemerintahan desa yang dianalisis secara simultan sehingga mampu memberikan perspektif yang lebih utuh dibandingkan penelitian terdahulu yang cenderung menguji kedua variabel secara parsial. Posisi penelitian juga diarahkan untuk memperluas kajian good governance dari fokus pengelolaan dana desa menuju kualitas tata kelola pemerintahan desa secara menyeluruh dengan menjadikan Desa Sirnajaya Kabupaten Bekasi sebagai konteks empiris penelitian. Pendekatan kuantitatif berbasis Structural Equation Modeling–Partial Least Squares dipilih karena memiliki kemampuan menguji hubungan laten antarvariabel secara komprehensif meskipun ukuran sampel relatif terbatas. Penggunaan SEM-PLS memungkinkan estimasi hubungan struktural yang lebih robust terhadap karakteristik data sosial sekaligus memberikan ketepatan dalam mengevaluasi validitas dan reliabilitas konstruk penelitian. Pemilihan pendekatan tersebut juga memberikan ruang untuk menghasilkan model empiris yang lebih representatif mengenai hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tata kelola pemerintahan Desa Sirnajaya Kabupaten Bekasi melalui pendekatan kuantitatif berbasis Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan model hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan desa dalam perspektif good governance pada tingkat pemerintahan desa. Dari sisi metodologis, penelitian ini menawarkan pengujian empiris menggunakan pendekatan SEM-PLS pada konteks desa dengan karakteristik populasi yang relatif kecil sehingga dapat memperluas penerapan metode tersebut dalam penelitian sektor publik. Kontribusi praktis penelitian diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan keterbukaan informasi, kualitas pertanggungjawaban, dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Temuan penelitian juga diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah desa, pemangku kepentingan, dan akademisi dalam mengembangkan strategi tata kelola yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif dan desain *explanatory research* yang bertujuan menguji hubungan kausal antara transparansi dan akuntabilitas terhadap tata kelola pemerintahan Desa Sirnajaya, Kabupaten Bekasi. Pendekatan eksplanatori dipilih karena memungkinkan pengujian empiris terhadap hubungan antarvariabel laten berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dari responden sehingga mampu menghasilkan bukti yang lebih objektif mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2022). Populasi penelitian berjumlah 30 orang yang terdiri atas perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Mengingat jumlah populasi relatif kecil, penelitian menerapkan teknik sampling jenuh (*sensus*) sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian dan jumlah sampel yang dianalisis sebanyak 30 responden (Sugiyono, 2022). Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert lima poin, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju). Variabel penelitian terdiri atas Transparansi (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) sebagai variabel independen serta Tata Kelola Pemerintahan Desa (Y) sebagai variabel dependen, dengan indikator yang diadaptasi dan dikembangkan dari berbagai penelitian terdahulu mengenai transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan desa agar memiliki kesesuaian dengan konteks penelitian (Cahyani et al., 2022; Husni et al., 2023; Oktavia & Biduri, 2024).



Gambar 1. Desain Penelitian

Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 3, karena metode ini sesuai untuk penelitian yang bertujuan mengembangkan model prediktif, memiliki ukuran sampel relatif kecil, serta tidak mensyaratkan distribusi data normal secara ketat (Hair et al., 2022; Ghozali, 2021). Tahapan analisis diawali dengan evaluasi model pengukuran (outer model) melalui pengujian validitas konvergen menggunakan nilai *outer loading* ($>0,70$) dan Average Variance Extracted (AVE) ($>0,50$), validitas diskriminan menggunakan kriteria Fornell–Larcker dan Heterotrait–Monotrait Ratio (HTMT), serta reliabilitas konstruk berdasarkan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability yang masing-masing memenuhi nilai minimum 0,70 (Hair et al., 2022). Evaluasi selanjutnya dilakukan pada model struktural (inner model) melalui pengujian koefisien determinasi (R^2), effect size (f^2), predictive relevance (Q^2), serta pengujian potensi multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) untuk memastikan tidak terjadi bias estimasi antarvariabel eksogen (Hair et al., 2022). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan prosedur bootstrapping dengan 5.000 subsampel dan tingkat signifikansi 5%, di mana hipotesis dinyatakan didukung apabila nilai T-statistics $> 1,96$ dan P-values $< 0,05$, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Pemilihan SEM-PLS dalam penelitian ini juga memungkinkan evaluasi simultan terhadap kualitas instrumen pengukuran dan kekuatan hubungan struktural antarvariabel sehingga menghasilkan model empiris yang lebih komprehensif dalam menjelaskan pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tata kelola pemerintahan Desa Sirnajaya Kabupaten Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Model Pengukuran (Convergent Validity dan Reliabilitas)

Evaluasi model pengukuran (*outer model*) dilakukan untuk memastikan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan konstruk laten yang diukur secara valid dan reliabel sebelum dilakukan pengujian hubungan struktural antarvariabel. Dalam pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), pengujian model pengukuran menjadi tahapan mendasar karena kualitas estimasi model struktural sangat dipengaruhi oleh kemampuan indikator dalam mengukur konstruk yang dibangun (Hair et al., 2022). Penelitian ini mengevaluasi validitas konvergen melalui nilai *outer loading*, kemudian dilanjutkan dengan pengujian reliabilitas internal menggunakan nilai

Cronbach's Alpha, *Composite Reliability*, serta *Average Variance Extracted* (AVE). Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi batas minimum yang direkomendasikan sehingga model pengukuran dapat digunakan untuk analisis pada tahap berikutnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa instrumen penelitian telah mampu menangkap dimensi transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan konstruk konseptual yang dirancang.

Tabel 1. Hasil Uji Outer Loading

Indikator	Akuntabilitas (X2)	Tata Kelola (Y)	Transparansi (X1)
X1.10	-	-	0,945
X1.8	-	-	0,857
X1.9	-	-	0,949
X2.1	0,812	-	-
X2.10	0,788	-	-
X2.2	0,815	-	-
X2.3	0,832	-	-
X2.4	0,791	-	-
X2.5	0,810	-	-
X2.6	0,926	-	-
X2.7	0,891	-	-
X2.8	0,829	-	-
X2.9	0,767	-	-
Y1	-	0,765	-
Y2	-	0,950	-
Y3	-	0,924	-
Y4	-	0,853	-
Y5	-	0,772	-
Y6	-	0,803	-
Y7	-	0,898	-
Y8	-	0,831	-

Sumber: Data diolah menggunakan SmartPLS 3 (2026)

Nilai *outer loading* pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai di atas batas minimum 0,70 sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen yang direkomendasikan dalam analisis PLS-SEM (Hair et al., 2022). Konstruk Transparansi menunjukkan rentang nilai *outer loading* antara 0,857 hingga 0,949, dengan indikator X1.9 sebagai indikator yang paling kuat dalam merepresentasikan keterbukaan informasi pemerintah desa. Konstruk Akuntabilitas memiliki nilai *outer loading* sebesar 0,767–0,926, di mana indikator X2.6 memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan konstruk, sedangkan seluruh indikator lainnya tetap berada pada kategori kuat. Pada konstruk Tata Kelola Pemerintahan Desa, nilai *outer loading* berkisar antara 0,765–0,950 dengan indikator Y2 menjadi representasi paling dominan terhadap kualitas tata kelola yang diamati. Variasi nilai *loading* tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki kemampuan yang memadai dalam menjelaskan konstruk laten, sehingga tidak terdapat indikator yang perlu dieliminasi dari model penelitian. Temuan ini memperlihatkan bahwa instrumen yang digunakan telah memiliki konsistensi konseptual yang baik dalam mengukur transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan desa, sejalan dengan pengembangan indikator pada penelitian tata kelola sektor publik yang menempatkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban sebagai dimensi utama dalam membangun pemerintahan yang efektif (Cahyani et al., 2022).

Evaluasi berikutnya difokuskan pada pengujian reliabilitas internal dan validitas konvergen untuk memastikan bahwa setiap konstruk tidak hanya memiliki indikator yang valid, tetapi juga menunjukkan tingkat konsistensi pengukuran yang tinggi. Reliabilitas konstruk dalam PLS-SEM umumnya dinilai menggunakan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*, sedangkan validitas konvergen dievaluasi melalui nilai AVE yang menggambarkan proporsi varians indikator yang mampu dijelaskan oleh konstruk laten (Ghozali, 2021).

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Konvergen

Variabel	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	AVE
Akuntabilitas (X2)	0,948	0,953	0,956	0,685
Tata Kelola (Y)	0,945	0,950	0,955	0,726
Transparansi (X1)	0,906	0,920	0,941	0,843

Sumber: Data diolah menggunakan SmartPLS 3 (2026)

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,90 sehingga mengindikasikan tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Nilai *Composite Reliability* tertinggi terdapat pada konstruk Akuntabilitas sebesar 0,956, diikuti Tata Kelola Pemerintahan Desa sebesar 0,955 dan Transparansi sebesar 0,941, yang mencerminkan konsistensi internal indikator dalam mengukur konstruk laten secara stabil (Hair et al., 2022). Nilai AVE masing-masing konstruk juga berada di atas ambang batas 0,50, yaitu sebesar 0,685 untuk Akuntabilitas, 0,726 untuk Tata Kelola Pemerintahan Desa, dan 0,843 untuk Transparansi, sehingga menunjukkan bahwa lebih dari separuh varians indikator berhasil dijelaskan oleh konstruk yang diwakilinya. Tingginya nilai AVE pada variabel Transparansi mengindikasikan bahwa indikator-indikator yang digunakan memiliki kemampuan representatif yang sangat baik dalam menjelaskan dimensi keterbukaan informasi pemerintahan desa. Konsistensi hasil reliabilitas dan validitas konvergen tersebut memperlihatkan bahwa instrumen penelitian memiliki kualitas pengukuran yang memadai untuk mengestimasi hubungan struktural antarvariabel tanpa mengalami permasalahan pengukuran yang berarti. Kondisi ini juga memperkuat temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengukuran transparansi dan akuntabilitas melalui indikator yang terstruktur mampu menghasilkan konstruk yang stabil serta layak digunakan dalam analisis hubungan kausal pada konteks pemerintahan desa (Setiyawati et al., 2023).

Evaluasi Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan dievaluasi untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam model memiliki karakteristik empiris yang berbeda sehingga mampu merepresentasikan konsep yang diukur tanpa mengalami tumpang tindih secara berlebihan. Dalam pendekatan PLS-SEM, pengujian ini umumnya dilakukan menggunakan kriteria Fornell–Larcker, yaitu membandingkan akar kuadrat nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dengan korelasi antarkonstruk (Hair et al., 2022). Konstruk dinyatakan memiliki validitas diskriminan yang baik apabila nilai akar kuadrat AVE pada diagonal utama lebih besar dibandingkan korelasi dengan konstruk lainnya. Pengujian ini menjadi penting karena tingginya korelasi antarkonstruk dapat mengindikasikan bahwa indikator belum sepenuhnya mampu membedakan konsep yang diukur. Hasil pengujian validitas diskriminan pada penelitian ini disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Diskriminan (Fornell–Larcker Criterion)

Variabel	Akuntabilitas (X2)	Tata Kelola (Y)	Transparansi (X1)
Akuntabilitas (X2)	0,827		
Tata Kelola (Y)	0,973	0,852	
Transparansi (X1)	0,956	0,963	0,918

Sumber: Data diolah menggunakan SmartPLS 3 (2026)

Hasil pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai korelasi antara Akuntabilitas dan Tata Kelola (0,973) maupun antara Transparansi dan Tata Kelola (0,963) lebih tinggi dibandingkan nilai akar kuadrat AVE masing-masing konstruk, sehingga kriteria Fornell–Larcker belum terpenuhi secara optimal. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antarvariabel dalam model penelitian sangat erat, terutama karena transparansi dan akuntabilitas secara konseptual merupakan dua prinsip utama yang membentuk praktik *good governance* pada pemerintahan desa. Tingginya korelasi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan pengukuran, tetapi dapat mencerminkan bahwa

responden memandang keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, dan kualitas tata kelola sebagai praktik administrasi yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi serupa masih dapat dijumpai pada penelitian sektor publik yang menggunakan konstruk-konstruk dengan kedekatan konseptual tinggi sehingga evaluasi validitas diskriminan tidak hanya bergantung pada satu kriteria pengujian (Hair et al., 2022). Atas dasar tersebut, interpretasi validitas diskriminan perlu dilengkapi menggunakan pendekatan Heterotrait–Monotrait Ratio (HTMT) yang dinilai lebih sensitif dalam mendeteksi perbedaan antar konstruk dibandingkan metode Fornell–Larcker, khususnya ketika hubungan antarvariabel bersifat sangat kuat (Ghozali, 2021). Secara substantif, tingginya hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola juga sejalan dengan karakteristik pemerintahan desa di Indonesia yang menempatkan kedua prinsip tersebut sebagai fondasi utama dalam pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pengelolaan keuangan desa (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022).

Evaluasi Model Struktural

Evaluasi model struktural (*inner model*) dilakukan untuk menilai kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan variasi variabel endogen serta mengukur kualitas model yang dibangun sebelum dilakukan interpretasi terhadap hasil pengujian hipotesis. Dalam pendekatan PLS-SEM, kualitas model struktural dapat diamati melalui nilai koefisien determinasi (R^2) yang menunjukkan besarnya proporsi varians variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian (Hair et al., 2022). Semakin tinggi nilai R^2 , semakin besar kemampuan prediktif model dalam menjelaskan fenomena yang diteliti, sehingga hubungan struktural yang dihasilkan memiliki tingkat ketepatan yang lebih baik. Evaluasi ini menjadi penting karena tidak hanya menggambarkan kekuatan model secara statistik, tetapi juga memberikan dasar untuk menilai relevansi variabel transparansi dan akuntabilitas dalam menjelaskan tata kelola pemerintahan desa. Hasil pengujian koefisien determinasi pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi (R-Square)

Variabel Endogen	R Square	Adjusted R Square
Tata Kelola Pemerintahan Desa (Y)	0,960	0,957

Sumber: Data diolah menggunakan SmartPLS 3 (2026)

Berdasarkan Tabel 4, variabel Tata Kelola Pemerintahan Desa memiliki nilai R Square sebesar 0,960, yang menunjukkan bahwa sebesar 96,0% variasi tata kelola pemerintahan desa mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel transparansi dan akuntabilitas, sedangkan 4,0% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,957 memperlihatkan bahwa kemampuan prediksi model tetap sangat tinggi setelah mempertimbangkan jumlah konstruk yang digunakan, sehingga model tidak mengalami penurunan daya jelas yang berarti akibat kompleksitas variabel. Berdasarkan kriteria evaluasi PLS-SEM, nilai R^2 di atas 0,75 dikategorikan sebagai substantial, sehingga model penelitian memiliki kemampuan prediktif yang sangat kuat dalam menjelaskan hubungan antarvariabel (Hair et al., 2022). Tingginya nilai koefisien determinasi mengindikasikan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan determinan utama yang berkontribusi terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan Desa Sirnajaya Kabupaten Bekasi, sehingga perubahan pada kedua variabel tersebut berpotensi diikuti oleh perubahan yang signifikan pada kualitas tata kelola pemerintahan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa praktik pemerintahan desa yang mengedepankan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik akan menghasilkan sistem tata kelola yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sebagaimana juga dilaporkan dalam penelitian mengenai tata kelola pemerintahan desa di Indonesia (Suciana et al., 2025). Tingginya kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen juga menunjukkan bahwa kerangka konseptual yang dibangun telah sesuai dengan karakteristik empiris pemerintahan desa, sehingga layak dijadikan dasar untuk menginterpretasikan hasil pengujian hubungan kausal pada tahap berikutnya.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa Sirnajaya Kabupaten Bekasi. Hubungan struktural antarvariabel dievaluasi melalui prosedur *bootstrapping* pada SEM-PLS dengan memperhatikan nilai *path coefficient*, *T-statistics*, dan *P-values* sebagai dasar pengambilan keputusan statistik (Hair et al., 2022). Pengujian ini memberikan gambaran mengenai arah hubungan sekaligus kekuatan pengaruh akuntabilitas terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Semakin tinggi nilai koefisien jalur yang diikuti oleh signifikansi statistik, semakin besar kontribusi variabel tersebut dalam menjelaskan perubahan pada variabel endogen. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan Antar Variabel	Original Sample	T Statistics	P Values	Keputusan
Akuntabilitas → Tata Kelola	0,607	5,888	0,000	Diterima
Transparansi → Tata Kelola	0,383	3,687	0,000	Diterima

Sumber: Data diolah menggunakan SmartPLS 3 (2026)

Berdasarkan Tabel 5, hubungan antara akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan desa memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,607 dengan nilai T-statistics sebesar 5,888 dan P-values sebesar 0,000. Nilai tersebut memenuhi kriteria pengujian hipotesis karena memiliki T-statistics lebih besar dari 1,96 serta P-values lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan desa dinyatakan diterima. Koefisien jalur yang bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan praktik akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Desa Sirnajaya diikuti oleh peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara konsisten mampu memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan, pelaksanaan program, serta penyampaian laporan kepada masyarakat. Besarnya koefisien jalur juga memperlihatkan bahwa akuntabilitas menjadi salah satu determinan utama dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif dalam memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga menjadi mekanisme kelembagaan yang memperkuat legitimasi pemerintah desa di hadapan masyarakat. Praktik pertanggungjawaban yang dilakukan secara terbuka mendorong aparatur desa untuk bekerja sesuai prosedur, mengurangi peluang terjadinya penyimpangan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik. Perspektif tersebut sejalan dengan konsep *good governance* yang menempatkan akuntabilitas sebagai fondasi dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022). Pada konteks Desa Sirnajaya, tingginya pengaruh akuntabilitas mengindikasikan bahwa responden menilai kualitas tata kelola lebih banyak ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kebijakan, program pembangunan, serta pengelolaan anggaran secara profesional. Hubungan tersebut juga memperlihatkan bahwa akuntabilitas mampu membangun kepercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kualitas pengawasan internal maupun eksternal.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Cahyani et al. (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa karena mendorong aparatur desa melaksanakan fungsi administrasi secara lebih tertib dan bertanggung jawab. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara akurat dan tepat waktu. Penelitian Setiyawati et al. (2023) juga menjelaskan bahwa praktik akuntabilitas yang baik berkaitan erat dengan peningkatan efektivitas pengelolaan dana desa melalui penguatan sistem administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian ini memperluas temuan tersebut karena menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas tidak hanya terbatas pada aspek pengelolaan keuangan, tetapi juga mencakup kualitas tata kelola pemerintahan desa secara lebih komprehensif. Keselarasan hasil antarpelitian memperlihatkan

bahwa penguatan sistem pertanggungjawaban merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang memiliki kredibilitas kelembagaan tinggi.

Implikasi empiris dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa Sirnajaya perlu diarahkan pada penguatan sistem akuntabilitas melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan mekanisme pelaporan, optimalisasi pengawasan internal, serta penyediaan informasi pertanggungjawaban yang mudah diakses masyarakat. Langkah tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan akuntabilitas juga menjadi semakin penting seiring meningkatnya tuntutan terhadap pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2024). Bukti empiris yang diperoleh menunjukkan bahwa investasi pada sistem akuntabilitas berpotensi menghasilkan peningkatan kualitas tata kelola yang lebih besar dibandingkan hanya berfokus pada aspek administratif semata. Temuan tersebut menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan pilar strategis dalam membangun pemerintahan desa yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pengaruh Transparansi terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam *good governance* yang berperan menciptakan keterbukaan informasi, memperkuat partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengujian hubungan antara transparansi dan tata kelola pemerintahan desa dilakukan menggunakan hasil *bootstrapping* pada model SEM-PLS dengan mengacu pada nilai koefisien jalur, *T-statistics*, dan *P-values* sebagai dasar pengambilan keputusan statistik (Hair et al., 2022). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana keterbukaan informasi yang diterapkan pemerintah desa mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Nilai koefisien yang dihasilkan juga memberikan gambaran mengenai besarnya kontribusi transparansi dibandingkan variabel lain dalam model penelitian. Hasil pengujian hubungan antarvariabel tetap mengacu pada Tabel 5 pada pembahasan sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 5, variabel transparansi memiliki koefisien jalur sebesar 0,383 dengan nilai *T-statistics* sebesar 3,687 dan *P-values* sebesar 0,000, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan desa dinyatakan diterima. Nilai tersebut menunjukkan bahwa peningkatan keterbukaan informasi yang dilakukan Pemerintah Desa Sirnajaya diikuti oleh peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Hubungan positif tersebut mengindikasikan bahwa penyampaian informasi mengenai perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, pengelolaan APBDes, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat menjadi faktor yang memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun besarnya koefisien pengaruh transparansi lebih rendah dibandingkan akuntabilitas, hasil ini tetap menunjukkan bahwa transparansi memiliki kontribusi yang signifikan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan, tetapi juga mendorong terbentuknya mekanisme pengawasan sosial yang lebih efektif.

Hasil penelitian ini mendukung perspektif bahwa transparansi merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu meningkatkan partisipasi dalam proses pengawasan maupun pengambilan keputusan publik. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Husni et al. (2023) yang menunjukkan bahwa transparansi pemerintah desa berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat melalui penyediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses. Penelitian Sofyani et al. (2023) juga menjelaskan bahwa praktik transparansi yang baik mampu memperkuat kepercayaan publik serta menurunkan persepsi terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan desa. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa transparansi memiliki nilai strategis tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai mekanisme kelembagaan yang memperkuat legitimasi pemerintah desa.

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian Choirunnisa dan Yusnita (2024) yang menemukan bahwa transparansi berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bekasi melalui penyediaan informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat. Kesamaan hasil tersebut memperlihatkan bahwa karakteristik sosial dan kelembagaan pemerintahan desa di Kabupaten Bekasi masih menempatkan keterbukaan informasi sebagai faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang berkualitas. Penelitian Yudastio dan Azriya (2023) menambahkan bahwa transparansi yang didukung oleh partisipasi masyarakat mampu menghasilkan pengelolaan pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik. Bukti empiris lainnya dari Fernanda et al. (2025) menunjukkan bahwa peningkatan transparansi juga berhubungan dengan efektivitas pengelolaan dana desa karena masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan. Keselarasan hasil tersebut memperlihatkan bahwa manfaat transparansi tidak hanya tercermin pada aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga pada peningkatan efektivitas tata kelola secara menyeluruh.

Jika dibandingkan dengan variabel akuntabilitas, transparansi memiliki koefisien pengaruh yang lebih rendah, yaitu 0,383 dibandingkan 0,607, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan desa relatif lebih kecil. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi akan memberikan dampak yang lebih optimal apabila diikuti oleh sistem pertanggungjawaban yang kuat dan mekanisme pelaksanaan program yang konsisten. Hasil ini sejalan dengan penelitian Putra dan Putra (2025), Gunawati et al. (2025), Ningsih dan Yuliana (2025), Wijaya (2025), dan Oci et al. (2023) yang menunjukkan bahwa transparansi akan menghasilkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif ketika diimplementasikan bersamaan dengan akuntabilitas, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sistem pengawasan internal. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa Sirnajaya tidak cukup hanya berfokus pada penyediaan informasi kepada masyarakat, tetapi juga perlu memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan didukung oleh proses pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi. Integrasi antara transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor yang menentukan terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang profesional, dipercaya masyarakat, dan mampu mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tata kelola Pemerintahan Desa Sirnajaya Kabupaten Bekasi menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan SmartPLS 3. Hasil evaluasi model pengukuran menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi kriteria validitas konvergen dan reliabilitas, sehingga instrumen penelitian dinyatakan mampu mengukur setiap konstruk secara konsisten dan akurat. Evaluasi model struktural juga memperlihatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara simultan mampu menjelaskan 96,0% variasi tata kelola pemerintahan desa, yang menunjukkan kemampuan prediktif model berada pada kategori sangat kuat. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa, sehingga peningkatan kualitas pertanggungjawaban aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, pelaksanaan program, dan penyampaian laporan kepada masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola. Transparansi juga terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan melalui peningkatan keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan APBDes yang mendorong pengawasan serta partisipasi masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* di tingkat desa memerlukan penguatan kedua aspek tersebut secara berkelanjutan agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Perbandingan nilai koefisien jalur menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan transparansi terhadap tata kelola Pemerintahan Desa Sirnajaya Kabupaten Bekasi, sehingga penguatan sistem pertanggungjawaban menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Implikasi praktis penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, optimalisasi mekanisme pengawasan, serta penyediaan informasi publik yang mudah diakses dan dipahami masyarakat. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya bukti empiris mengenai hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan desa melalui pendekatan SEM-PLS pada konteks

pemerintahan desa di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa model yang dibangun mampu menjelaskan hubungan antarvariabel secara komprehensif sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan model tata kelola pemerintahan desa. Penelitian berikutnya disarankan melibatkan jumlah responden yang lebih besar, memperluas cakupan wilayah penelitian, serta menambahkan variabel lain seperti kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, atau pemanfaatan teknologi informasi untuk memperoleh model yang lebih komprehensif. Upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang semakin relevan dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, C. Z., Basri, Y. M., & Kurnia, P. (2022). Accountability, transparency, competence of village apparatus, and internal control system in village financial management. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 77–94. <https://doi.org/10.20473/baki.v7i1.30786>
- Choirunnisa, U. N. A. I., & Yusnita, H. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 11(3), 353–359. <https://doi.org/10.35137/jabk.v11i3.103>
- Fernanda, R., Panggabean, F. Y., & Siregar, O. K. (2025, October). Analysis of Transparency and Effectiveness of Village Fund Management: a Case Study in Kubucolia Village, Berastagi. In *Proceedings of International Conference on Islamic Community Studies* (pp. 4206–4212). <https://proceeding.pancabudi.ac.id/index.php/ICIE/article/view/1016>
- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0 (Edisi Revisi)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawati, I. S., Seviani, H. N., Lestari, N. D., Susilowati, N., & Mahmud, A. (2025, September). Transparency and Accountability in Village Fund Management. In *Proceedings of International Conference on Economics, Business, and Economic Education* (pp. 173–182). <https://proceedings.unnes.ac.id/ice-bess/article/view/4624>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage Publications.
- Husni, M., Damayanti, R. A., & Indriyawati, A. (2023). The role of village government performance and transparency in influencing village public trust. *Journal of Accounting and Investment*, 24(2), 450–461. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17114>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- Ningsih, L. W., & Yuliana, L. (2025). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes 2024 di Desa Sowanlor, Jepara. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2). <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.818>
- Oktavia, S., & Biduri, S. (2024). Transparent governance: Unveiling accountability in village budget management. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(2). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1040>
- Oci, Y., Wahyudi, H., & Al-Ra'zie, Z. H. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Adhikari*, 2(4), 443–456. <https://doi.org/10.53968/ja.v2i4.88>
- Putra, V. A., & Putra, W. M. (2025). Accountability, transparency, and fraud propensity in village governments: The mediating role of justice. *Journal of Accounting and Investment*, 26(2). <https://doi.org/10.18196/jai.v26i2.25650>
- Setiyawati, H., Rahayu, P., & Nugroho, L. (2023). Determinants of accountability for the management of funds vis-à-vis village governments in Indonesia (Empirical case in Sukabumi, West Java). *Sosyoekonomi*, 31(56), 191–204. <https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2023.02.09>
- Sofyani, H., Yaya, R., & Saleh, Z. (2023). Transparency and community trust in village government: Does corruption perception matter? *Financial Accountability & Management*, 39(2), 355–374. <https://doi.org/10.1111/faam.12351>
- Suciana, S., Widiastuti, C. T., & Meiriyanti, R. (2025). Transparansi dan akuntabilitas terhadap

- pengelolaan alokasi dana desa dengan good governance sebagai variabel intervening. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 997-1008. <https://doi.org/10.59086/jam.v4i2.943>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi 2)*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yudastio, Y., & Azriya, N. (2023). Accountability, transparency, and participation in village fund management. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1). <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.28997>
- Wijaya, D. (2025). E-Government: Pilar transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa (Studi kasus Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto). *JUMINTAL: Jurnal Manajemen Informatika dan Bisnis Digital*, 4(1). <https://doi.org/10.55123/jumintal.v4i1.5108>